DENASYA SMART PUBLISHER

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jilak
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

OPEN ACCESS

DOI: https://doi.org/10.69714/hx8p7x55

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI UTANG USAHA BERDASARKAN SAK EP PADA PT KARYA MACHINDO INDUSTRIES KABUPATEN BEKASI

Indriani Catur Sendang [a*], Fitri Amaliyah [b], Imam Hasan [c]
[a] Fakultas Sekolah Vokasi / DIII Akuntansi; indrianicatur.s2@gmail.com, Universitas Harkat Negeri; Jl. Mataram No. 9 Kota Tegal Jawa Tengah
[c] Fakultas Sekolah Vokasi / DIII Akuntansi; fitri.amaliyah@harkatnegeri.ac.id, Universitas Harkat Negeri; Jl. Mataram No. 9 Kota Tegal Jawa Tengah
[c] Fakultas Sekolah Vokasi / DIII Akuntansi; imamhasan@harkatnegeri.ac.id, Universitas Harkat Negeri; Jl. Mataram No. 9 Kota Tegal Jawa Tengah
[*] Penulis Korespondensi: Indriani Catur Sendang

ABSTRACT

Trade payables are short-term liabilities arising from credit purchases of goods or services, so their accounting treatment must comply with accounting standards to avoid misstatement in financial statements. This study assesses the conformity of the accounting treatment of trade payables with the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) at PT Karya Machindo Industries, Bekasi Regency, a manufacturer that has experienced delays in paying its suppliers. A descriptive qualitative method following the Miles and Huberman model was used, based on observation, interviews with purchasing, finance, and accounting staff, and documentation of the 2025 trade payables list. The results show that the recognition, measurement, and presentation of trade payables conform to SAK EP, whereas disclosure does not, because the company has not prepared Notes to Financial Statements (CALK). This non-conformity appears to stem from a financial reporting orientation focused on tax compliance. The company is advised to prepare CALK covering accounting policies, balances by supplier, maturity, and payment-delay risk, and to improve its cash-flow management.

Keywords: *Trade Payables; SAK EP; Recognition; Measurement; Presentation; Disclosure*

Abstrak

Utang usaha merupakan liabilitas jangka pendek yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok, sehingga pencatatannya harus sesuai standar akuntansi agar tidak menimbulkan kesalahan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi utang usaha berdasarkan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada PT Karya Machindo Industries Kabupaten Bekasi, yang mengalami keterlambatan pembayaran kepada pemasok. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Miles dan Huberman, melalui observasi, wawancara dengan staf Purchasing, Finance, dan Accounting, serta dokumentasi daftar utang usaha tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian utang usaha telah sesuai dengan SAK EP, sedangkan pengungkapan belum sesuai karena perusahaan belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan orientasi pelaporan keuangan yang hanya diarahkan untuk kepentingan perpajakan. Perusahaan disarankan menyusun CALK yang memuat kebijakan akuntansi, rincian saldo per pemasok, jatuh tempo, dan risiko keterlambatan pembayaran, serta memperbaiki pengelolaan arus kas.

Kata Kunci: Utang Usaha; SAK EP; Pengakuan; Pengukuran; Penyajian; Pengungkapan

Naskah Masuk 27 Agustus 2026; Revisi 2 September 2026; Diterima 14 Oktober 2026; Terbit 2 November 2026

1. PENDAHULUAN

Industri manufaktur di Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perusahaan dituntut mengelola aktivitas operasional dan keuangan secara efektif dan efisien agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan adalah utang usaha, yaitu liabilitas jangka pendek yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok dan berkaitan erat dengan manajemen modal kerja, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas dan kebutuhan operasional perusahaan [1]. Kesalahan dalam perlakuan akuntansi utang usaha dapat menyebabkan distorsi informasi keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan manajemen maupun pihak eksternal seperti investor dan kreditur [1].

Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan adalah SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Standar ini mengharuskan entitas melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan liabilitas secara konsisten agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya [2], dan penerapannya menjadi penting terutama bagi perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah yang belum terdaftar di pasar modal. SAK EP disusun dengan mengacu pada IFRS for SMEs, yang dirancang dengan persyaratan pengungkapan jauh lebih ringkas daripada IFRS penuh agar tidak membebani entitas tanpa akuntabilitas publik [3]. Meskipun demikian, pengungkapan tetap merupakan bagian wajib dari laporan keuangan.

PT Karya Machindo Industries merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknik dan manufaktur komponen mesin, meliputi hardening dan fabrikasi sesuai kebutuhan konsumen, yang berlokasi di Cibuntu, Kabupaten Bekasi. Aktivitas produksi perusahaan melibatkan transaksi pembelian bahan baku dan komponen secara kredit dari pemasok, sehingga menimbulkan utang usaha sebagai bagian dari liabilitas yang harus dikelola dengan tepat untuk menjaga kelancaran produksi dan hubungan dengan pemasok.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat entitas yang belum menerapkan standar akuntansi secara optimal. Penerapan SAK EP pada PT XYZ belum optimal karena perusahaan belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan secara lengkap [4];penerapan SAK ETAP pada suatu perusahaan sudah cukup baik, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku [5]; sementara pada koperasi, penerapan standar akuntansi masih belum sepenuhnya sesuai karena laporan keuangan yang disusun belum lengkap [6]. Studi pada usaha kecil dan menengah di Arab Saudi juga menemukan bahwa penerapan IFRS for SMEs bersifat parsial dan kerap hanya bersifat simbolis akibat kompleksitas standar, beban biaya, dan keterbatasan keahlian akuntansi [7]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menilai penerapan standar secara keseluruhan, sedangkan kajian yang menelaah perlakuan akuntansi satu akun liabilitas, yaitu utang usaha pada perusahaan manufaktur, berdasarkan empat aspek (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) sepengetahuan penulis masih terbatas. Di situlah kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi selama praktik kerja lapangan, pengelolaan utang usaha di PT Karya Machindo Industries masih menghadapi permasalahan keterlambatan pembayaran kepada pemasok yang sering melebihi batas jatuh tempo, sehingga memicu penagihan berulang melalui

email, telepon, dan WhatsApp, bahkan penghentian layanan atau pemblokiran otomatis oleh sebagian pemasok. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara praktik akuntansi yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan SAK EP. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi utang usaha berdasarkan SAK EP pada PT Karya Machindo Industries Kabupaten Bekasi, dengan tujuan mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi utang usaha pada empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, dengan data yang digunakan berupa daftar utang usaha tahun 2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir siklus akuntansi yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi [8]. Laporan keuangan juga dipahami sebagai informasi kuantitatif keuangan suatu entitas dalam periode tertentu yang merupakan hasil proses akuntansi [9]. Agar bermanfaat bagi pengguna, laporan keuangan perlu memenuhi karakteristik kualitatif seperti keterpahaman, relevansi, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, prudensi, kelengkapan, keterbandingan, ketepatwaktuan, serta keseimbangan antara manfaat dan biaya [2]. Menurut SAK EP, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) [2],[4].

2.2. Standar Akuntansi Keuangan dan SAK Entitas Privat

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia saat ini terdiri atas empat pilar, yaitu SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) [2]. SAK EP berlaku bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditor dan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha [2]. Standar ini disahkan pada 30 Juni 2021, berganti nama menjadi SAK Indonesia untuk Entitas Privat pada 12 Desember 2022, dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 [2]. Transisi pencatatan dari metode kas maupun metode akrual yang tidak konsisten ke standar baru ini masih menjadi kendala bagi banyak entitas, terutama usaha kecil dan menengah [10].

Perlakuan akuntansi utang usaha berdasarkan SAK EP diatur terutama dalam Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar, dengan definisi liabilitas pada Bab 2 konsep dan prinsip pervasif, penyajian pada Bab 3 dan Bab 4 laporan posisi keuangan, dan pengungkapan pada Bab 8 (CALK) [2]. Perlakuan tersebut mencakup empat komponen. Pertama, pengakuan (recognition): entitas mengakui utang usaha ketika telah menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut, yaitu saat barang telah diterima atau jasa telah dinikmati sehingga timbul kewajiban hukum kepada pemasok. Kedua, pengukuran (measurement): pada pengukuran awal, utang usaha diukur pada harga transaksi (nilai faktur), sedangkan pada pengukuran selanjutnya diukur pada nilai nominal yang belum dibayar dikurangi pembayaran yang telah dilakukan. Ketiga, penyajian (presentation): liabilitas disajikan pada laporan posisi keuangan untuk menunjukkan likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Keempat, pengungkapan (disclosure): entitas wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi, rincian saldo utang kepada pemasok maupun pihak berelasi, serta risiko nilai tukar apabila terdapat utang dalam mata uang asing, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) [2].

2.3. Utang Usaha

Utang usaha adalah liabilitas yang timbul dari pembelian barang, perlengkapan, atau jasa secara kredit, yang umumnya diakui perusahaan sebesar harga pembelian yang tertera pada invoice [2], dan merupakan salah satu bentuk liabilitas lancar yang paling umum ditemui dalam kegiatan operasional perusahaan [11]. Keberadaan utang usaha memberikan fleksibilitas pengelolaan arus kas karena perusahaan tidak harus membayar secara langsung pada saat transaksi terjadi, namun pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu likuiditas maupun hubungan dengan pemasok, sehingga pencatatan dan pengendalian utang usaha sangat diperlukan [12]. Utang usaha memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu meningkatkan likuiditas, mengoptimalkan modal kerja, membangun kredibilitas bisnis dengan pemasok, dan mendukung pertumbuhan bisnis, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan melalui evaluasi dan kategorisasi utang, penyusunan rencana pembayaran yang realistis, negosiasi dengan kreditur, serta peningkatan efisiensi operasional [13].

Penelitian mengenai penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan Koperasi XYZ menunjukkan bahwa penerapan SAK EP menyebabkan perubahan perlakuan akuntansi pada investasi entitas anak dan asosiasi, imbalan kerja, imbalan pasca kerja, serta penerapan pajak tangguhan [14]. Penelitian mengenai pemeriksaan liabilitas jangka pendek menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan liabilitas perusahaan disajikan secara wajar, lengkap, dan sesuai prinsip akuntansi [11]. Penelitian pada PT XYZ menemukan bahwa perusahaan belum optimal menerapkan SAK EP karena belum menyajikan CALK, meskipun pencatatan transaksinya sudah sesuai ketentuan [4]. Penelitian mengenai penerapan SAK EP pada laporan keuangan triwulan sebuah bank perekonomian rakyat menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut membuat laporan keuangan lebih sistematis, transparan, dan sesuai standar entitas privat [15]. Berbagai temuan tersebut memperkuat perlunya evaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi utang usaha pada PT Karya Machindo Industries.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT Karya Machindo Industries, perusahaan manufaktur dengan sistem job order yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi–Cibitung KM 22, Kampung Cibuntu Asem, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan pengumpulan data lapangan selama enam bulan, yaitu Januari sampai Juni 2026. Data kuantitatif yang dianalisis adalah daftar utang usaha periode tahun 2025, yaitu tahun buku yang telah berakhir dan merupakan tahun pertama berlakunya SAK EP secara efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah [16]. Data yang digunakan meliputi data kualitatif berupa hasil wawancara dengan Staf Purchasing, Staf Finance, dan Staf Accounting, serta data kuantitatif berupa daftar utang usaha tahun 2025.

Sumber data terdiri atas data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan serta dokumen invoice, faktur pajak, surat jalan, dan purchase order [17], dan data sekunder berupa referensi buku, jurnal, serta laman resmi perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara, yaitu observasi terhadap aktivitas pengelolaan utang usaha, wawancara dengan divisi purchasing, finance, dan accounting, dokumentasi berupa berkas daftar utang usaha dan bukti transaksi, serta studi pustaka atas literatur akuntansi, utang usaha, dan SAK EP [18]. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap: pengumpulan data terkait daftar utang usaha tahun 2025; reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan;

penyajian data dalam bentuk perbandingan antara praktik perusahaan dengan ketentuan SAK EP; dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian [19].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama praktik kerja lapangan pada PT Karya Machindo Industries, dengan informan staf divisi purchasing, finance, dan accounting yang terlibat langsung dalam proses timbulnya pencatatan, dan pembayaran utang usaha.

4.1 Pengakuan Utang Usaha

Berdasarkan SAK EP Bab 2 dan Bab 11, liabilitas diakui ketika entitas memiliki kewajiban yang timbul akibat transaksi masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Pada PT Karya Machindo Industries, setiap barang yang diterima selalu disertai surat jalan yang menjadi bukti serah terima dan menjadi dasar penerbitan invoice oleh pemasok. Staf Purchasing menyatakan, "iya, karena jika ingin menerbitkan invoice barang harus diserahkan terlebih dahulu". Meskipun proses input data ke sistem baru dilakukan setelah invoice diterima dan diverifikasi, tanggal transaksi yang dicatat tetap mengacu pada tanggal surat jalan, sebagaimana ditegaskan Staf Accounting: "perusahaan akan mencatat utang saat invoice diterima, tetapi tanggal transaksi sesuai tanggal invoice yang diterbitkan mengikuti tanggal surat jalan." Praktik ini konsisten dengan prinsip substansi mengungguli bentuk, sehingga pengakuan utang usaha pada perusahaan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan SAK EP. Meskipun demikian, karena pencatatan dilakukan setelah invoice diterima, terdapat risiko pemisahan periode (cut-off): barang yang sudah diterima pada akhir periode tetapi invoicenya belum diterima berpotensi belum tercatat sebagai utang usaha pada periode tersebut.

4.2 Pengukuran Utang Usaha

SAK EP Bab 11 mensyaratkan pengakuan awal liabilitas keuangan diukur sebesar harga transaksi. Pada PT Karya Machindo Industries, nilai utang usaha dicatat sebesar nilai nominal pada invoice yang telah dicocokkan dengan purchase order (PO). Sebagai ilustrasi, pembelian senilai Rp10.000.000 dengan diskon dagang 2% menghasilkan nilai bersih Rp9.800.000, yang setelah ditambah PPN 11% Rp1.078.000 menjadi Rp10.878.000 sebagai nilai yang dijurnal sebagai utang usaha. Setiap invoice diverifikasi terlebih dahulu oleh Divisi Finance dan Accounting; apabila ditemukan selisih nilai, dokumen dikembalikan untuk dikonfirmasi ulang kepada pemasok. Diskon dagang langsung menjadi pengurang nilai invoice, dan untuk transaksi impor perusahaan menerapkan skema uang muka (DP) 50% serta pelunasan 50% sebelum barang dikirim, sehingga tidak terdapat saldo utang usaha dalam mata uang asing yang perlu diukur ulang pada akhir periode. Dengan demikian, pengukuran utang usaha dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan SAK EP.

4.3 Penyajian Utang Usaha

SAK EP Bab 3 dan Bab 4 mensyaratkan liabilitas jangka pendek, termasuk utang usaha, disajikan secara terpisah dari kelompok liabilitas maupun ekuitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Pada PT Karya Machindo Industries, akun utang usaha disajikan pada kelompok Pasiva dan dipisahkan dari akun liabilitas lain seperti utang pajak dan biaya yang masih harus dibayar, sebagaimana disampaikan Staf Accounting: "akun Pasiva." Kelompok Pasiva memuat liabilitas dan ekuitas, sehingga penyajian yang dimaksud adalah pada bagian liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Selain pada laporan posisi keuangan, perusahaan juga menyajikan informasi utang usaha melalui daftar utang usaha yang disusun Divisi Finance sebagai dasar pengajuan pembayaran kepada Direktur sebelum dana ditransfer melalui e-banking. Pemilihan invoice yang dibayarkan pada setiap periode mempertimbangkan tanggal jatuh tempo dan kondisi

kas perusahaan, didukung mekanisme persetujuan berjenjang oleh Direktur. Dengan demikian, penyajian utang usaha dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan SAK EP.

4.4 Pengungkapan Utang Usaha

SAK EP Bab 8 dan ketentuan pengungkapan pada Bab 11 mewajibkan entitas menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat kebijakan akuntansi, rincian saldo liabilitas, serta informasi risiko dan jatuh tempo liabilitas. Berdasarkan hasil observasi, peneliti tidak menemukan dokumen CALK pada berkas yang dikelola Divisi Accounting. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Staf Accounting yang menjawab singkat "tidak" ketika ditanya mengenai penyusunan CALK. Perusahaan memang memiliki daftar utang usaha yang memuat nama pemasok, tanggal faktur, dan jumlah utang tiap faktur sebagai dasar pertimbangan pembayaran, namun dokumen tersebut hanya bersifat operasional internal dan belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pengungkapan yang memadai bagi pihak eksternal. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa entitas privat sering belum optimal menerapkan SAK EP karena belum menyusun CALK meskipun pencatatan transaksinya sendiri relatif sesuai [4]. Dengan demikian, pengungkapan utang usaha pada PT Karya Machindo Industries dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan SAK EP.

Tabel 1 merangkum hasil analisis kesesuaian keempat aspek perlakuan akuntansi utang usaha pada PT Karya Machindo Industries terhadap ketentuan SAK EP.

Tabel 1. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Utang Usaha dengan SAK EP

Aspek	Ketentuan SAK EP	Praktik PT Karya Machindo Industries	Kesesuaian
Pengakuan	Utang usaha diakui saat entitas menerima manfaat ekonomi barang/jasa dan memiliki kewajiban hukum kepada pemasok (SAK EP Bab 2 dan bab 11).	Diakui pada tanggal surat jalan (saat barang diterima), meskipun pencatatan baru dilakukan setelah invoice diterima dan diverifikasi.	Sesuai
Pengukuran	Pengukuran awal pada harga transaksi (nilai faktur); pengukuran selanjutnya pada nilai nominal terutang dikurangi pembayaran (SAK EP Bab 11).	Dicatat sebesar nilai invoice yang telah diverifikasi terhadap PO; diskon dagang menjadi pengurang langsung; tidak ada eksposur kurs karena transaksi impor dilunasi penuh (DP 50% + pelunasan 50%) sebelum pengiriman.	Sesuai
Penyajian	Utang usaha disajikan terpisah dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan (SAK EP Bab 3 dan bab 4).	Disajikan pada akun Pasiva, terpisah dari utang pajak dan biaya yang masih harus dibayar; didukung daftar utang usaha dan mekanisme persetujuan pembayaran oleh Direktur.	Sesuai
Pengungkapan	Entitas wajib menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat kebijakan akuntansi, rincian saldo, dan risiko liabilitas (SAK EP Bab 8).	Belum menyusun CALK; pengungkapan hanya berupa daftar utang usaha internal yang tidak memuat kebijakan akuntansi maupun risiko secara formal.	Belum sesuai

Sumber: Data diolah, 2026

4.5 Pembahasan Ketidaksesuaian Pengungkapan dan Implikasinya

Ketidaksesuaian pada aspek pengungkapan menjadi temuan paling signifikan di antara keempat aspek yang diteliti. Orientasi pelaporan keuangan perusahaan yang selama ini hanya diarahkan

untuk memenuhi kebutuhan perpajakan, khususnya penyusunan neraca dan laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan Badan, membuat perusahaan belum merasa perlu menyusun CALK, tanpa mempertimbangkan kebutuhan informasi bagi pihak eksternal seperti pemasok dan kreditor.

Faktor penyebab. Selain orientasi perpajakan tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang berpotensi menjelaskan belum disusunnya CALK. Pertama, tahun 2025 merupakan tahun pertama SAK EP berlaku efektif [2], sedangkan transisi ke standar baru masih menjadi kendala bagi banyak entitas [10]. Kedua, kapasitas dan pemahaman staf akuntansi terhadap ketentuan pengungkapan dapat menjadi hambatan; studi pada usaha kecil dan menengah di Arab Saudi menemukan bahwa keterbatasan keahlian akuntansi, kompleksitas standar, dan beban biaya mendorong penerapan yang bersifat simbolis [7], dan pada PT XYZ pencatatan transaksi telah sesuai tetapi CALK tidak disajikan [4]. Ketiga, tidak adanya tuntutan eksternal, misalnya persyaratan CALK dari pemasok, bank, atau auditor, dapat membuat penyusunannya tidak dianggap mendesak.

Tanpa CALK, pemasok dan kreditor tidak memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi, rincian saldo per pemasok, dan jatuh tempo utang, sehingga sulit menilai risiko kredit perusahaan. Kondisi ini relevan dengan permasalahan penelitian: pemasok yang mengalami keterlambatan pembayaran berulang cenderung mengambil tindakan sepihak, seperti penghentian layanan atau pemblokiran otomatis, sedangkan informasi jatuh tempo dan rencana pembayaran yang diungkapkan secara formal berpotensi meningkatkan transparansi kepada pemasok. Selain itu, laporan keuangan tanpa CALK berisiko dinilai tidak lengkap dan tidak dapat dinyatakan sesuai SAK EP apabila diperiksa oleh pihak yang berwenang atau digunakan untuk pengajuan pembiayaan.

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu. Temuan ini sejalan dengan penelitian pada PT XYZ yang menemukan CALK belum disajikan meskipun pencatatan sudah sesuai [4], serta penelitian pada koperasi yang menemukan laporan keuangan belum lengkap [6]. Perbedaannya, penelitian ini memperlihatkan bahwa pola yang sama juga terjadi pada level satu akun liabilitas, yaitu utang usaha: tiga aspek pertama sesuai, tetapi aspek pengungkapan tertinggal.

Permasalahan keterlambatan pembayaran yang melatarbelakangi penelitian ini sendiri lebih banyak bersumber dari keterbatasan kas operasional pada akhir bulan dibandingkan anggaran yang diestimasikan pada awal bulan, bukan dari kesalahan pencatatan akuntansi, sehingga perbaikan perlakuan akuntansi perlu diiringi dengan perbaikan pengelolaan arus kas agar permasalahan keterlambatan pembayaran kepada pemasok dapat benar-benar teratasi [1],[13].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dari empat aspek perlakuan akuntansi utang usaha yang diteliti pada PT Karya Machindo Industries, tiga aspek yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dengan ketentuan SAK EP. Pengakuan utang usaha telah sesuai karena tanggal transaksi mengacu pada tanggal surat jalan sebagai dasar timbulnya kewajiban. Pengukuran telah sesuai karena nilai yang dicatat merupakan nilai transaksi riil berdasarkan invoice yang telah diverifikasi terhadap PO. Penyajian telah sesuai karena utang usaha disajikan secara terpisah pada kelompok liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Namun, aspek pengungkapan belum sesuai dengan ketentuan SAK EP karena perusahaan belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang berkaitan dengan orientasi pelaporan keuangan yang selama ini hanya difokuskan pada kebutuhan perpajakan. Ketiadaan CALK

berpotensi menyulitkan pemasok dan kreditor menilai risiko kredit perusahaan. Secara keseluruhan, permasalahan keterlambatan pembayaran yang menjadi latar belakang penelitian ini lebih banyak bersumber dari keterbatasan kas operasional, bukan dari kesalahan pencatatan akuntansi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya satu perusahaan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan manufaktur lain. Kedua, data yang dianalisis terbatas pada daftar utang usaha satu periode, yaitu tahun 2025. Ketiga, data bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi internal perusahaan tanpa triangulasi dengan pihak eksternal seperti pemasok atau konsultan pajak. Keempat, informan terbatas pada staf divisi Purchasing, Finance, dan Accounting selama praktik kerja lapangan, sehingga faktor penyebab belum disusunnya CALK belum dapat dikonfirmasi dari sudut pandang manajemen atau pemilik.

5.3 Saran

Bagi PT Karya Machindo Industries, disarankan untuk: (1) menetapkan batas waktu maksimal penerimaan invoice setelah barang diterima, misalnya 3–5 hari kerja, disertai komunikasi kepada pemasok agar invoice dapat diterbitkan lebih segera; (2) mulai menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan memanfaatkan daftar utang usaha yang telah ada sebagai dasar penyusunan, dalam bentuk sederhana yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyusunan dan pernyataan kepatuhan terhadap SAK EP, kebijakan akuntansi utang usaha, rincian saldo per pemasok, informasi umur dan jatuh tempo, utang dalam mata uang asing bila ada, serta risiko keterlambatan pembayaran; (3) memperbaiki pengelolaan arus kas melalui penyusunan jadwal pembayaran berdasarkan prioritas jatuh tempo, peningkatan perencanaan arus kas, serta negosiasi ulang syarat pembayaran dengan pemasok bila diperlukan; (4) menyusun prosedur pencatatan akrual pada akhir periode untuk barang yang telah diterima tetapi invoicenya belum diterima; (5) memberikan pelatihan bagi staf akuntansi mengenai SAK EP, khususnya penyusunan CALK; dan (6) mulai mempertimbangkan kebutuhan informasi pemasok, kreditor, dan pihak eksternal lain dalam penyusunan laporan keuangan, tidak hanya untuk kepentingan perpajakan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan (1) memperluas ruang lingkup penelitian dengan menganalisis komponen liabilitas jangka pendek lainnya seperti utang pajak dan biaya yang masih harus dibayar, (2) melakukan studi komparatif pada beberapa perusahaan sejenis dan beberapa periode, (3) menambahkan triangulasi dengan pemasok atau konsultan pajak serta wawancara dengan manajemen untuk menguji faktor penyebab belum disusunnya CALK, memperdalam analisis status jatuh tempo, serta (4) mengkaji dampak ketidaksesuaian perlakuan akuntansi utang usaha terhadap rasio keuangan perusahaan seperti current ratio, quick ratio, dan days payable outstanding.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bumi Aksara. Jakarta, 2022. doi: 9790106386.

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan IAI. Jakarta, 2024. [Online]. Available: https://web.iaiglobal.or.id/

[3] D. Perera and P. Chand, "Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMEs)," *Advsnce Account.*, vol. 31, no. 1, pp. 165–178, 2015, doi: 10.1016/j.adiac.2015.03.012.

[4] F. Aprilia, M. I. Saputri, R. Defi Damayanti, Mais, and R. Gusliana, "Optimalisasi Penerapan SAK Entitas Privat pada Laporan Keuangan PT XYZ," *Logist. Account. Dev. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 232–

241, 2025.
[5] N. C. Sarah, A. P. Banowati, N. Nuraini, T. Alifiani, and R. G. Mais, "Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada PT Utama Radar Cahaya Tbk," *Publ. Ris. Mhs. Akunt. J.*, vol. 6, no. 1, 2025, doi: https://doi.org/10.35957/prima.v6i1.10118.
[6] B. N. F. S. Shafira, E. E. Sasanti, and Z. Isnaini, "Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Kopersi di Kota Mataram," *J. Apl. Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 95–107, 2022, [Online]. Available: https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/155
[7] A. Alribi, "Institutional and economic determinants of IFRS - for - SMEs adoption among Saudi small - and medium - sized enterprises," *Fucure Bus. Jounal*, vol. 12, no. 1, p. 134, 2026, doi: 10.1186/s43093-026-00844-3.
[8] B. Murifal, D. E. Revita, and Suhartono, *Akuntansi Keuangan Menengah*, 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020. [Online]. Available: https://harkatnegeri.perpustakaan.co.id/
[9] P. Sirait, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 2*. Expert. Yogyakarta, 2019. [Online]. Available: https://harkatnegeri.perpustakaan.co.id/
[10] F. Amaliyah, I. Hasan, K. F. Ardhi, and Y. P. Sari, "Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencatatan Keuangan Sederhana Menuju Tertib pembukuan Bagi Pelaku UMKM Nasabah Pantas Ulam PT PNM Cabang Tegal," *J. Abdimas Sangkabira*, vol. 2, no. 1, pp. 23–30, 2021, doi: 10.29303/abdimassangkabira.v2i1.69.
[11] N. Miranti and F. Putri, "Pemeriksaan Liabilitas Jangka Pendek," Universitas Persada Indonesia, 2025. [Online]. Available: https://dosen.upi-yai.ac.id/v5/dokumen/materi/940091/221_20250421094424_Pemeriksaan Liabilitas Jangka Pendek.pdf
[12] A. Nurkhin, A. K. Widiatami, P. N. Sari, and H. Khuluq, "Pendalaman Materi Akuntansi Perusahaan Manufaktur Pada Guru SMK PGRI 2 Taman Pemalang," *J. Implementasi*, vol. 1, no. 1, pp. 53–56, 2021, [Online]. Available: https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/article/view/21
[13] I. Ismail, "Utang Usaha: Kunci Rahasia Pertumbuhan Bisnis yang Jarang Dibicarakan," *Accurate Online*, 2025, [Online]. Available: https://accurate.id/aplikasi-kasir/utang-usaha/
[14] J. Maulana, Marismiati, and G. G. Wirakanda, "Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ," *Logist. Account. Dev. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 101–107, 2023, doi: 10.47491/landjournal.v4i1.2985.
[15] A. A. Pramesti, "Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Triwulan Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private (SAK EP) pada PT. BPR Bank Tegal (PERSERODA)," Universitas Harkat Negeri Tegal, 2025. [Online]. Available: https://repository.harkatnegeri.ac.id/5635/9/SAMPUL.PDF
[16] F. Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. IAIN Kediri, 2022. [Online]. Available: https://repository.iainkediri.ac.id/859/
[17] U. Sulung and M. Muspawi, "Memahami Ssumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier," *J. Edu Res. IICLS*, vol. 5, no. September, pp. 110–116, 2024, [Online]. Available: https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195
[18] Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2020.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. sutopi. S.Pd (ed); Cetakan ke 1. Alfabeta*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.